

Pengabdian Kepada Masyarakat: Mengabdikan Melalui Organisasi Mathla'ul Anwar

Elly Nurlia¹

¹Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ellynurlia@gmail.com

Received: 14.08.2025	Revised: 27.08.2025	Accepted: 15.09.2025	Available online: 29.09.2025
-------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------

Abstract : *Community Service through Mathla'ul Anwar (MA) was chosen because this organization has a strategic role in education, da'wah, and community empowerment. The importance of this topic lies in MA's contribution to strengthening the quality of human resources through a moderate Islamic educational foundation. The method of service was carried out through the author's active participation as an MA cadre, with an approach that included internal organizational coordination, external advocacy to the government, and collaboration with the National Amil Zakat Agency (BAZNAS). The results of the activities show that internal coordination strengthens cadre development, external advocacy is able to bridge community aspirations with public policy, and collaboration with BAZNAS opens access to scholarships as well as the development of educational infrastructure. In conclusion, community service through MA is not only a form of social worship but also an important instrument in building a religious, empowered, and prosperous society.*

Keywords: *Community Service, Mathla'ul Anwar, Education, Empowerment*

Abstrak : Pengabdian masyarakat melalui Mathla'ul Anwar (MA) dipilih karena organisasi ini memiliki peran strategis dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan umat. Pentingnya topik ini terletak pada kontribusi MA dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui basis pendidikan Islam yang moderat. Metode pengabdian dilakukan melalui partisipasi aktif penulis sebagai kader MA dengan pendekatan koordinasi internal organisasi, advokasi eksternal kepada pemerintah, dan kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa koordinasi internal memperkuat kaderisasi, advokasi eksternal mampu menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan publik, dan kolaborasi dengan BAZNAS membuka akses beasiswa serta pembangunan infrastruktur pendidikan. Kesimpulannya, pengabdian masyarakat melalui MA bukan hanya wujud ibadah sosial, tetapi juga instrumen penting dalam membangun masyarakat yang religius, berdaya, dan sejahtera.

Kata Kunci: Pengabdian masyarakat, Mathla'ul Anwar, Pendidikan, Pemberdayaan

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman etnis, agama, budaya, dan bahasa. Keberagaman tersebut di satu sisi merupakan kekayaan bangsa, namun di sisi lain dapat menjadi potensi konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat untuk membangun kohesi sosial, memperkuat pendidikan, serta menjaga nilai-nilai kebangsaan. Salah satu elemen penting yang turut berperan dalam dinamika ini adalah organisasi kemasyarakatan berbasis Islam, yang sejak masa pergerakan nasional telah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat (Noor, 2016).

Mathla'ul Anwar (MA) adalah salah satu organisasi Islam yang lahir dari rahim masyarakat Banten pada 10 Juli 1916 di Menes, Pandeglang. Organisasi ini didirikan oleh para ulama, di antaranya KH. Abdurrahman Bin Jamal, KH. E. Muhammad Yasin, KH. Tb. Soleh Kananga, dan KH. Arsyad Tegal, sebagai respons terhadap kebutuhan pendidikan Islam yang bermutu, sistematis, dan terjangkau bagi masyarakat pedesaan yang pada masa itu masih terbatas aksesnya terhadap pendidikan formal (Al-Bantani, 2019). Kehadiran MA tidak hanya memajukan dunia pendidikan Islam melalui madrasah dan pesantren, tetapi juga berperan dalam pembinaan umat dan penguatan moral masyarakat (Asnawi, 2020).

Seiring perjalanan waktu, Mathla'ul Anwar berkembang menjadi organisasi yang berperan penting dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan. Melalui jaringan madrasah, pesantren, dan sekolah umum yang dikelolanya, MA telah berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat konstitusi. Data terbaru dari PB MA per 20 Juni 2025 menunjukkan bahwa organisasi ini membina 427 madrasah, data ini tidak termasuk perguruan Tinggi, data ini

terdiri dari 36 Raudhatul Athfal (RA), 267 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 91 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 33 Madrasah Aliyah (MA) yang masih aktif (PB MA Bidang Pendidikan, 2025). Melalui lembaga-lembaga pendidikan tersebut, ribuan siswa di berbagai daerah mendapatkan akses pendidikan Islam yang moderat dan berkualitas. Selain itu, MA juga memberikan program beasiswa bagi siswa berprestasi maupun kurang mampu, serta mengembangkan program pemberdayaan ekonomi umat melalui koperasi, pelatihan kewirausahaan, dan penguatan ekonomi mikro.

Urgensi pengabdian di Mathla'ul Anwar terletak pada upaya dalam menjawab permasalahan nyata masyarakat, terutama kesenjangan akses pendidikan, keterbatasan biaya sekolah, serta tantangan ekonomi keluarga. Dengan jaringan sekolah dan pesantren yang tersebar luas, MA menjadi garda depan dalam membuka kesempatan belajar bagi masyarakat pedesaan yang sering terpinggirkan. Tidak hanya itu, melalui program sosial dan ekonomi, MA berusaha meringankan beban masyarakat, khususnya di kalangan menengah ke bawah, sehingga pengabdiannya mampu memberikan dampak multidimensi: mencerdaskan, menyejahterakan, sekaligus membangun kesadaran kebangsaan.

Di tengah arus globalisasi, modernisasi, dan tantangan zaman seperti degradasi moral, radikalisme, dan kesenjangan sosial, keberadaan Mathla'ul Anwar semakin relevan. Melalui kerja-kerja sosial, dakwah, dan pendidikan, MA telah menunjukkan bahwa pengabdian melalui organisasi tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga merupakan bagian dari kontribusi strategis dalam merawat bangsa dan negara (Mahdi, 2021). Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat melalui wadah organisasi Mathla'ul Anwar dapat dipahami sebagai wujud nyata dari implementasi ajaran Islam *rahmatan lil-'alamin*, sekaligus penguatan peran umat Islam dalam pembangunan nasional.

Sejarah dan Filosofi Organisasi Mathla'ul Anwar

Dinamakan Mathla'ul Anwar yang memiliki arti tempat lahirnya cahaya. Mathla'ul Anwar lahir di Banten sebagai jawaban ulama setempat terhadap kebutuhan pendidikan Islam yang sistematis dan terjangkau. Organisasi ini didirikan melalui musyawarah para kiai di Menes, Pandeglang pada 10 Juli 1916. Sejak awal MA memposisikan diri sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan “menyinar” umat melalui ilmu dan akhlak. (Fatimatuzahrotul Aini, 2022). Pendiri dan tokoh-tokoh awal MA berasal dari kalangan ulama Banten yang memiliki jejaring keilmuan luas (termasuk hubungan dengan ulama Mekkah dan tradisi pesantren).

Nama-nama yang sering disebut dalam literatur lokal dan kajian sejarah antara lain KH. Mas Abdurrahman (Raden Mas Abdurrahman Saleh), KH. Entol Muhammad Yasin, KH. Tubagus Muhammad Sholeh, serta beberapa kiai setempat lainnya yang berperan dalam merintis lembaga-lembaga pendidikan di Menes pada awal abad ke-20. Konstelasi pendiri inilah yang kemudian memastikan MA berkembang sebagai gerakan pendidikan-dakwah yang berakar kuat di masyarakat Banten. Seiring waktu MA berkembang pesat dan menyebar ke banyak daerah di Indonesia serta mendirikan berbagai jenjang lembaga pendidikan, mulai dari Tingkat RA/TPA, madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), madrasah aliyah (MA), hingga institusi tinggi seperti Universitas Mathla'ul Anwar (Saepul Bahri, 2023).

Nama *Mathla'ul Anwar* sendiri secara harfiah berarti Tempat atau Sumber Terbitnya Cahaya. Filosofi ini tidak hanya sebatas simbolik, tetapi mencerminkan cita-cita luhur organisasi untuk menjadi pelita bagi masyarakat melalui pencerahan ilmu pengetahuan dan keimanan. Sejak kelahirannya itulah, Mathla'ul Anwar (MA) memposisikan diri sebagai kekuatan sosial-keagamaan yang berupaya menghapus kebodohan, membina akhlak, serta memperkuat solidaritas umat. Dalam konteks kelembagaan, filosofi tersebut dirumuskan secara praktis ke dalam tiga pilar utama yakni pendidikan, dakwah, dan sosial (LP3H Mathla'ul Anwar, 2016).

Pertama, pada aspek pendidikan, Mathla'ul Anwar menempatkan pendidikan sebagai instrumen utama transformasi sosial. Bagi MA, pendidikan merupakan jalan untuk membangun generasi yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman. Hal ini tercermin dari kurikulum dan praktik pendidikan di madrasah maupun sekolah yang dikelola MA, di mana terdapat upaya memadukan pengajaran kitab klasik (*kitab kuning*) dengan ilmu-ilmu umum yang relevan

dengan perkembangan sains dan teknologi. Dengan demikian, pendidikan di bawah naungan MA tidak hanya menekankan penguasaan teks-teks agama, tetapi juga pembentukan moralitas, keterampilan hidup, serta daya adaptasi terhadap perubahan sosial. Cita-cita ini terus berkembang hingga ke jenjang perguruan tinggi, sebagai manifestasi nyata dari visi organisasional untuk menjadikan pendidikan sebagai pusat pencerahan umat.

Kedua, pada pilar dakwah, MA mengembangkan model dakwah yang berorientasi pada Islam *rahmatan lil-'alamin*. Dakwah ini tidak hanya berbentuk pengajaran agama melalui majelis ilmu, ceramah, atau pendidikan formal, tetapi juga menghadirkan pendekatan yang menekankan keseimbangan antara dimensi spiritual dan sosial. Dengan demikian, dakwah MA cenderung bersifat moderat, toleran, serta menekankan ukhuwah dan persaudaraan sesama umat manusia. Karakter dakwah seperti ini berperan penting dalam merawat kebhinekaan Indonesia sekaligus memperkuat nilai-nilai Islam yang damai dan konstruktif (LP3H Mathla'ul Anwar, 2016).

Ketiga, pada dimensi sosial, filosofi Mathla'ul Anwar terwujud melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Program-program sosial tersebut meliputi pemberdayaan ekonomi, layanan sosial, pendidikan masyarakat, hingga kerja sama kelembagaan dengan pemerintah daerah dan organisasi lain. Berbagai unit MA, baik di tingkat pusat maupun daerah, berupaya menghadirkan solusi atas kebutuhan lokal, misalnya pelatihan keterampilan, penyediaan layanan keagamaan (termasuk sertifikasi halal), serta pembangunan infrastruktur pendidikan dan sosial. Aktivitas ini menegaskan bahwa MA tidak hanya bergerak dalam ruang pendidikan dan dakwah, tetapi juga hadir nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (LP3H Mathla'ul Anwar Banten, 2020).

Dengan demikian, filosofi “Sumber Cahaya” yang melekat pada Mathla'ul Anwar menemukan manifestasinya dalam tiga pilar utama organisasi yaitu pendidikan, dakwah, dan sosial. Ketiganya saling terkait dan saling memperkuat, sehingga MA tetap relevan dalam merespons kebutuhan umat dan bangsa, baik di tingkat lokal maupun nasional.

2. METODE

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yaitu dengan berpartisipasi menjadi kader Mathla'ul Anwar dari tahun 2015 sampai sekarang tahun 2025 dengan menjadi pengurus besar Mathla'ul Anwar dalam bidang kaderisasi dan organisasi. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan terus memberikan penguatan kepada organisasi dengan mengadakan rapat koordinasi internal di Mathla'ul Anwar, bekerjasama dan memberi masukan kepada pemerintah serta melakukan kegiatan sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rapat Koordinasi Internal Mathla'ul Anwar

Rapat koordinasi internal merupakan langkah strategis dalam memperkuat visi dan misi Mathla'ul Anwar sebagai organisasi sosial-keagamaan dan pendidikan. Forum ini berfungsi tidak hanya sebagai sarana konsolidasi, tetapi juga sebagai media untuk mempertegas arah gerak organisasi dalam merespons tantangan zaman. Melalui rapat koordinasi, pengurus di berbagai tingkatan mulai dari pusat (PB MA), wilayah (PW MA), daerah (PD MA) maupun otonom MA seperti Himpunan Mahasiswa Mathla'ul Anwar (HIMMA), GEMA MA dan MUSMA dapat menyamakan persepsi, membangun sinergi, serta merumuskan kebijakan yang selaras dengan kebutuhan Masyarakat.



Gambar 1. Rapat koordinasi

Dalam praktiknya, rapat koordinasi Mathla'ul Anwar mencakup pembahasan mengenai strategi pengembangan lembaga pendidikan, penguatan kaderisasi, serta implementasi program-program sosial. Misalnya, dalam bidang pendidikan, rapat koordinasi menjadi ajang untuk mengevaluasi kualitas kurikulum, peningkatan kompetensi guru, serta pembangunan infrastruktur sekolah dan madrasah. Pada bidang sosial, rapat ini menghasilkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, layanan sosial keagamaan, hingga kerja sama dengan pemerintah daerah maupun lembaga mitra strategis (Mahdi, 2021).

Selain itu, rapat koordinasi juga berfungsi sebagai arena refleksi kelembagaan. Evaluasi program yang telah dijalankan menjadi dasar penting untuk mengukur efektivitas organisasi, sekaligus menemukan solusi terhadap hambatan yang dihadapi di lapangan. Dengan demikian, rapat koordinasi bukan hanya kegiatan administratif, tetapi juga ruang belajar kolektif dalam menjaga relevansi Mathla'ul Anwar dengan perkembangan sosial, politik, dan budaya masyarakat Indonesia (Asnawi, 2020).

Keberlangsungan rapat koordinasi internal menunjukkan keseriusan Mathla'ul Anwar dalam menjalankan prinsip musyawarah dan kolektivitas. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Islam dan tradisi organisasi kemasyarakatan di Indonesia, yang menekankan pentingnya kebersamaan dalam mengelola peran keumatan dan kebangsaan (Noor, 2016). Oleh karena itu, rapat koordinasi internal dapat dipandang sebagai wujud nyata dari filosofi sumber cahaya Mathla'ul Anwar, yakni menyinari umat dengan ilmu, solidaritas, dan program kerja yang membumi.

B. Memberikan Masukan kepada Pemerintah Provinsi Banten

Mathla'ul Anwar aktif menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Banten. Keterlibatan Mathla'ul Anwar (MA) dalam memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Banten menunjukkan bahwa organisasi masyarakat Islam tidak hanya hadir dalam ranah pendidikan dan dakwah, tetapi juga dalam advokasi kebijakan publik. Sebagai organisasi yang memiliki sejarah panjang dalam dunia pendidikan dan sosial, MA mempunyai modal sosial yang kuat berupa jaringan lembaga pendidikan, basis massa, serta pengalaman langsung dalam mengelola sekolah dan pesantren. Modal ini membuat MA mampu menghadirkan perspektif yang berakar pada kebutuhan nyata masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan (Sarah Ayu, 2020).

Pengabdian masyarakat lewat organisasi masyarakat Mathla'ul Anwar dengan menjadi kader yaitu sebagai sarana merawat bangsa melalui dakwah yang Mencerahkan dan menyejukkan dalam konteks dakwah, Mathla'ul Anwar mengedepankan pendekatan yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dakwah dilakukan tidak hanya di mimbar masjid, tetapi juga melalui media sosial, seminar, dan program pemberdayaan masyarakat. Dalam menjawab tantangan zaman dan maka perlunya kolaborasi dan jaringan dengan untuk memperkuat agar program-program dapat menjangkau lebih luas dan berdaya guna tinggi.



Gambar 2. Memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Banten tentang Pendidikan di Banten dan Beasiswa

Audiensi dan advokasi yang dilakukan memiliki makna strategis. Dari sisi fungsi sosial, kegiatan ini menjadi sarana kontrol terhadap kebijakan pemerintah yang terkadang tidak sepenuhnya menyentuh kelompok masyarakat marginal. Dengan membawa data empiris dari madrasah, sekolah swasta, dan masyarakat pedesaan, MA mampu menunjukkan celah yang sering terabaikan dalam birokrasi, seperti keterbatasan akses beasiswa atau kurangnya infrastruktur pendidikan. Hal ini sejalan dengan pandangan Noor (2016) yang menegaskan bahwa ormas Islam memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara negara dan masyarakat.

Dari sisi demokrasi, keterlibatan MA memperkuat partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan kebijakan. Habermas (1996) dalam teori demokrasi deliberatif menekankan pentingnya ruang publik sebagai arena diskusi rasional, di mana masyarakat dapat memberikan masukan kepada negara. Dalam konteks ini, pengabdian lewat MA menghadirkan suara masyarakat Banten ke ruang kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi lebih kuat. Pandangan ini sejalan dengan Liddle (2001), yang melihat ormas Islam sebagai salah satu pilar civil society dalam konsolidasi demokrasi Indonesia.

Masukan kepada Pemerintah Provinsi Banten umumnya mencakup tiga hal utama. *Pertama*, peningkatan mutu madrasah dan sekolah swasta di bawah naungan MA agar sejajar dengan sekolah negeri. *Kedua*, perluasan akses beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu, terutama di daerah pedesaan yang masih rentan dengan kesenjangan pendidikan. *Ketiga*, pembangunan sarana-prasarana pendidikan, termasuk ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan dukungan teknologi digital. Dengan rekomendasi ini, pengabdian lewat MA tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan, tetapi juga sebagai aktor advokasi kebijakan publik yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan pemerintah daerah (Mahdi, 2021; Supriyadi, 2022).

Sehingga, peran pengabdian lewat Mathla'ul Anwar dalam memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Banten dapat dipahami sebagai bagian dari sinergi antara negara dan masyarakat sipil. Keterlibatan ini tidak hanya menguatkan legitimasi kebijakan pemerintah, tetapi juga memperlihatkan kontribusi ormas Islam dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

C. Audiensi Mathla'ul Anwar (MA) dengan Baznas Republik Indonesia

Selain menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah, Mathla'ul Anwar (MA) juga aktif membangun hubungan kelembagaan dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Republik Indonesia sebagai upaya memperkuat peran sosial-keagamaan sekaligus memperluas kontribusi organisasinya di tingkat nasional. Kemitraan ini berangkat dari kesadaran bahwa zakat, infak, dan sedekah (ZIS) bukan hanya instrumen ibadah, tetapi juga sumber daya strategis untuk mendukung pembangunan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi umat



Gambar 3. Melakukan audiensi kepada Baznas Republik Indonesia, dalam rangka Kerjasama dalam bidang Pendidikan beasiswa dan bantuan untuk gedung sekolah.

Audiensi yang dilakukan ini bukan sekadar pertemuan formal, tetapi merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi kelembagaan antara organisasi masyarakat Islam dengan lembaga pengelola zakat nasional. Tujuan utamanya adalah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, baik melalui program beasiswa maupun pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih memadai.

Dalam pertemuan tersebut, MA menekankan pentingnya beasiswa untuk siswa dan mahasiswa dari keluarga dhuafa. Beasiswa bukan hanya sekadar bantuan finansial, melainkan investasi sosial jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Melalui dukungan Baznas, peluang bagi anak-anak di daerah pedesaan maupun perkotaan yang berada dalam lingkaran kemiskinan dapat diperluas sehingga mereka mampu melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan visi MA sebagai organisasi yang menempatkan pendidikan sebagai pilar utama peradaban umat.

Selain aspek beasiswa, MA juga mendorong dukungan Baznas terhadap pembangunan sarana-prasarana pendidikan, seperti gedung sekolah, ruang laboratorium, perpustakaan, dan asrama. Infrastruktur yang memadai diyakini menjadi faktor penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan menciptakan iklim akademik yang sehat. Dengan adanya sinergi ini, MA diharapkan dapat mengoptimalkan perannya dalam menyelenggarakan pendidikan yang inklusif dan berdaya saing di tengah tantangan globalisasi.

Kerja sama MA dengan Baznas juga memperlihatkan bahwa peran ormas Islam tidak lagi terbatas pada dakwah dan pengajaran tradisional semata, melainkan telah berkembang menjadi aktor sosial yang berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi umat. Baznas sebagai lembaga resmi negara dalam pengelolaan zakat memiliki berbagai program nasional, seperti *Beasiswa Cendekia Baznas*, *Beasiswa Santri Baznas*, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Dengan menggandeng MA, jangkauan program-program tersebut dapat diperluas secara lebih tepat sasaran, mengingat MA memiliki basis massa dan jaringan pendidikan yang luas, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Data terbaru dari PB MA per 20 Juni 2025 menunjukkan bahwa organisasi ini membina 427 madrasah yang terdiri dari 36 Raudhatul Athfal (RA), 267 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 91 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 33 Madrasah Aliyah (MA) yang masih aktif (PB MA Bidang Pendidikan, 2025).

Tabel. Sekolah Binaan Mathla'ul Anwar (MA) per 20 Juni 2025

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Estimasi Siswa per	Estimasi Total Siswa
	Lembaga	Lembaga	
Raudhatul Athfal (RA)	36	100	3.600 siswa
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	267	250	66.750 siswa
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	91	300	27.300 siswa
Madrasah Aliyah (MA)	33	350	11.550 siswa
Total	427	-	109.200 siswa

Sumber: PB MA Bidang Pendidikan (2025), estimasi jumlah siswa dihitung berdasarkan rata-rata kapasitas per jenjang.

Jumlah lembaga pendidikan tersebut menjadi indikator nyata bahwa jika dukungan Baznas melalui program beasiswa dan pembangunan infrastruktur pasti akan memberikan dampak luas bagi ribuan siswa dan masyarakat penerima manfaat di berbagai daerah. Audiensi MA dengan Baznas juga memperlihatkan bahwa peran ormas Islam tidak lagi terbatas pada dakwah dan pengajaran tradisional semata, melainkan telah berkembang menjadi aktor sosial yang berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi umat. Baznas sebagai lembaga resmi negara dalam pengelolaan zakat memiliki berbagai program nasional, seperti Beasiswa Cendekia Baznas, Beasiswa Santri Baznas, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Dengan menggandeng MA, jangkauan program-program tersebut dapat diperluas secara lebih tepat sasaran, mengingat MA memiliki basis massa dan jaringan pendidikan yang luas, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Dari perspektif akademis, audiensi ini dapat dipandang sebagai bentuk nyata dari konsep *civil society partnership*, di mana organisasi kemasyarakatan Islam berperan sebagai mitra strategis negara dalam pembangunan sosial. Habermas (1996) menyebut hal ini sebagai praktik deliberasi publik, yaitu proses komunikasi timbal balik antara masyarakat sipil dan negara untuk memperkuat legitimasi kebijakan. Dalam konteks Indonesia, keterlibatan ormas Islam seperti MA dalam program Baznas juga memperkuat prinsip *collaborative governance*, yang menekankan pentingnya sinergi antar-aktor negara dan non-negara dalam menghadapi persoalan kompleks seperti kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan (Ansell & Gash, 2008).

Sebagai tindak lanjut dari audiensi tersebut, Mathla'ul Anwar (MA) dan Baznas Republik Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Nomor 057/MoU/BAZNAS/09/2025 dan Nomor B.0211/PBMA/MOU/2025 tentang *Pendidikan, Riset dan Inovasi, Pengabdian Masyarakat, LAZISMA, Dakwah, Pesantren, dan UMKM Bersertifikat Halal*. MoU yang ditandatangani pada 4 September 2025 ini menjadi dasar hukum dan komitmen kedua belah pihak untuk memperkuat sinergi kelembagaan di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan dakwah (BAZNAS RI & PBMA, 2025).

Ruang lingkup MoU ini mencakup delapan bidang strategis: (1) penguatan pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman dan keumatan, (2) pengembangan riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat, (3) literasi dan edukasi zakat, (4) pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), (5) penguatan kelembagaan zakat di lingkungan MA, (6) dakwah berbasis komunitas, (7) pengembangan pesantren sebagai pusat pendidikan dan ekonomi umat, serta (8) pembinaan UMKM bersertifikat halal (BAZNAS RI & PBMA, 2025).

Salah satu implementasi konkret dari MoU ini adalah pengajuan bantuan rehabilitasi *Mathla'ul Anwar Boarding School (MABS)* di Cimanuk, Pandeglang. Pada 22 Mei 2025, PBMA mengirimkan surat resmi Nomor 611/SEK/PMA/V/2025 kepada Baznas RI untuk memohon bantuan dana sebesar Rp250.000.000 guna merehabilitasi dapur santri MABS yang hangus terbakar akibat korsleting listrik pada 10 Mei 2025. Rencana anggaran biaya (RAB) meliputi pembangunan dapur seluas 80 m² dengan rincian: lantai keramik (Rp12 juta), dinding bata dan cat (Rp19,6 juta), atap baja ringan (Rp20 juta), kamar mandi santri (Rp20 juta), pintu dan jendela (Rp15 juta), instalasi listrik (Rp6

juta), instalasi air (Rp6 juta), finishing (Rp10 juta), upah tukang selama tiga bulan (Rp100 juta), serta biaya lain-lain sebesar Rp41,4 juta (Pengurus Perguruan Mathla'ul Anwar Pusat, 2025).

Pengajuan bantuan ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki fasilitas fisik yang rusak, tetapi juga memastikan kelancaran aktivitas pendidikan dan kehidupan santri di pesantren. Dengan adanya dukungan Baznas RI, rehabilitasi dapur MABS diharapkan dapat memperkuat peran sekolah ini sebagai pusat kaderisasi umat Islam yang moderat, inklusif, dan berdaya saing.

MoU dan pengajuan rehabilitasi ini menunjukkan bahwa kerjasama antara MA dan Baznas tidak berhenti pada tataran seremonial, tetapi diwujudkan dalam program nyata yang berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat. Hal ini mencerminkan praktik *collaborative governance* di mana lembaga zakat negara dan organisasi masyarakat Islam bersinergi membangun pendidikan Islam yang berkualitas sekaligus memperkuat pemberdayaan sosial-ekonomi umat.

D. Analisis Pembahasan

Kegiatan yang dilakukan Mathla'ul Anwar (MA) mencerminkan model pengabdian masyarakat berbasis organisasi yang memadukan dimensi pendidikan, sosial, dan keagamaan. Hal ini terlihat jelas dari skala dan capaian yang diperoleh. Data PB MA per 20 Juni 2025 mencatat bahwa MA membina 427 madrasah aktif, terdiri atas 36 Raudhatul Athfal (RA), 267 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 91 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 33 Madrasah Aliyah (MA). Jumlah ini belum termasuk Universitas Mathla'ul Anwar (UMNA) serta sejumlah pesantren tradisional yang juga berada dalam orbit MA. Besarnya jumlah lembaga pendidikan ini menggambarkan skala tanggung jawab yang harus dikelola organisasi, sekaligus menunjukkan kontribusi riil MA dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat konstitusi.

Pertama, koordinasi internal. Dengan ribuan guru, puluhan ribu siswa, dan ratusan madrasah binaan, MA membutuhkan sistem kelembagaan yang solid. Forum musyawarah dan rapat koordinasi yang secara rutin digelar menjadi instrumen untuk menyamakan visi, merumuskan strategi, serta memperkuat jaringan pendidikan dan sosial yang tersebar di berbagai daerah. Hal ini sejalan dengan teori *capacity building* (Grindle, 1997) yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas internal sebagai prasyarat keberhasilan organisasi masyarakat sipil. Secara empiris, koordinasi ini tampak dari terselenggaranya *Rapat Kerja Nasional* (Rakernas) MA yang menghasilkan kebijakan peningkatan mutu guru, standarisasi kurikulum, serta digitalisasi administrasi pendidikan. Data PB MA juga menunjukkan bahwa dari 427 madrasah binaan, mayoritas masih berlokasi di daerah pedesaan, sehingga penguatan kapasitas manajemen sangat menentukan agar visi pendidikan moderat dapat menjangkau masyarakat lapisan bawah.

Kedua, advokasi eksternal. MA berperan aktif dalam menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan publik. Audiensi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait menjadi sarana MA menyalurkan rekomendasi peningkatan mutu madrasah, program beasiswa, serta perbaikan infrastruktur pendidikan. Sebagai contoh, dalam kurun 2022–2024, lebih dari 1.200 siswa dari keluarga dhuafa berhasil menerima beasiswa yang difasilitasi melalui jejaring MA, baik dari pemerintah daerah maupun lembaga mitra. Aktivitas ini menunjukkan fungsi MA sebagai *interest group* (Noor, 2016) yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat dengan negara. Dalam kerangka *demokrasi deliberatif* (Habermas, 1996), advokasi ini juga memperluas ruang partisipasi publik sekaligus meningkatkan legitimasi kebijakan pemerintah. Dengan jaringan pendidikan yang luas, MA memiliki posisi tawar yang cukup signifikan sehingga aspirasinya lebih mudah masuk ke dalam agenda kebijakan publik.

Ketiga, kolaborasi dengan lembaga filantropi. MA menjalin kemitraan strategis dengan Baznas RI dalam memperluas akses sumber daya pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Kemitraan ini ditegaskan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Nomor 057/MoU/BAZNAS/09/2025 dan Nomor B.0211/PBMA/MOU/2025 yang ditandatangani pada 4 September 2025. MoU tersebut mencakup delapan bidang kerja sama strategis, di antaranya penguatan pendidikan, riset dan inovasi, pengabdian masyarakat, dakwah, pesantren, serta pembinaan UMKM bersertifikat halal (BAZNAS & PBMA, 2025).

Implementasi konkret dari MoU tersebut terlihat pada pengajuan bantuan rehabilitasi dapur santri Mathla'ul Anwar Boarding School (MABS) di Cimanuk, Pandeglang. Pasca kebakaran yang terjadi pada 10 Mei 2025 akibat korsleting listrik, PBMA mengirimkan surat resmi Nomor 611/SEK/PMA/V/2025 kepada BAZNAS RI untuk memohon bantuan dana sebesar Rp250.000.000. Anggaran tersebut dirinci dalam RAB, meliputi pembangunan dapur seluas 80 m² dengan kebutuhan antara lain lantai keramik, dinding bata, atap baja ringan, kamar mandi, instalasi listrik dan air, hingga upah tukang selama tiga bulan (Pengurus Perguruan MA Pusat, 2025).

Selain itu, bentuk nyata sinergi antara lembaga keagamaan dan perguruan tinggi juga tercermin dalam kerjasama BAZNAS Provinsi Banten dengan berbagai universitas, seperti UNTIRTA, UIN BANTEN, Universitas Mathla'ul Anwar dll. Program yang dijalankan meliputi *Beasiswa Cendekia* BAZNAS bagi mahasiswa kurang mampu, pendampingan kemahasiswaan, pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, hingga gerakan *Zakat Goes to Campus* untuk meningkatkan literasi dan kesadaran zakat di kalangan akademisi.

Dari sisi pemberdayaan ekonomi, MA juga mulai mengembangkan program koperasi dan usaha kecil berbasis komunitas madrasah. Kolaborasi dengan Baznas dan pemerintah daerah membuka peluang permodalan serta pelatihan kewirausahaan. Data internal MA mencatat bahwa pada tahun 2023–2024 terdapat lebih dari 500 keluarga mustahik di Pandeglang dan Lebak yang menerima bantuan modal usaha melalui program sinergi zakat produktif. Hal ini menunjukkan bahwa peran MA meluas, tidak hanya sebagai penyelenggara pendidikan, tetapi juga sebagai aktor pembangunan sosial-ekonomi.

Secara keseluruhan, kegiatan MA memperlihatkan perannya sebagai jembatan strategis antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga zakat dalam memperkuat pembangunan berbasis pendidikan dan nilai keagamaan. Data empiris berupa 427 madrasah binaan, ribuan penerima beasiswa, serta ratusan keluarga penerima manfaat zakat produktif menegaskan bahwa MA mampu mengartikulasikan kebutuhan masyarakat sekaligus menghadirkan solusi konkret. Dengan memanfaatkan basis sosial yang kuat dan jejaring kelembagaan yang luas, MA menjadi representasi ormas Islam yang berhasil mengintegrasikan misi keagamaan dengan agenda pembangunan nasional.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Mathla'ul Anwar (MA) menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat berbasis organisasi mampu memadukan tiga aspek utama. Pertama, koordinasi internal yang memperkuat kapasitas organisasi melalui kaderisasi, konsolidasi, dan pengembangan jaringan lembaga pendidikan. Kedua, advokasi eksternal yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan publik, khususnya dalam bidang pendidikan, beasiswa, dan pembangunan infrastruktur. Ketiga, kolaborasi dengan lembaga filantropi dan pemerintah, yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama BAZNAS RI serta implementasinya dalam bentuk pengajuan bantuan rehabilitasi dapur santri Mathla'ul Anwar Boarding School (MABS) Cimanuk, Pandeglang.

Dengan demikian, MA berperan strategis sebagai jembatan antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga zakat dalam memperkuat pembangunan berbasis pendidikan, sosial, dan keagamaan. Hal ini sekaligus memperlihatkan bagaimana peran ormas Islam dapat berkembang dari sekadar penyelenggara pendidikan menuju aktor sosial yang berkontribusi nyata dalam pemberdayaan umat.

Bagi penulis, pengabdian melalui Mathla'ul Anwar merupakan wujud tanggung jawab moral, sosial, dan religius untuk melanjutkan perjuangan organisasi ini. Menjadi kader bukan hanya posisi struktural, tetapi sebuah amanah yang menuntut konsistensi, keikhlasan, dan kerja nyata. Melalui keterlibatan aktif, penulis berupaya menjaga tradisi perjuangan para pendahulu, memperkuat jaringan kelembagaan, serta memperluas ruang pengabdian agar manfaat organisasi semakin dirasakan oleh umat dan bangsa.

Lebih jauh, pengalaman pengabdian ini juga menjadi media pembelajaran dalam menumbuhkan kepemimpinan, memperdalam pemahaman Islam moderat, serta meneguhkan komitmen kebangsaan. Dengan spirit khidmah, perjuangan di Mathla'ul Anwar dipandang bukan

hanya sebagai bentuk ibadah sosial, tetapi juga kontribusi konkret dalam mewujudkan masyarakat yang religius, berdaya, inklusif, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Fatimatzahrotul. (2022). *Konsistensi Pemikiran dan Gerakan Dakwah Organisasi Mathla'ul Anwar di Indonesia*. Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah, <https://jurnalfuad.org/index.php/ishlah/index>
- Ayu R, Sarah Ayu R. Arif Akhyat. (2020). *Mathla'ul Anwar 1952-1985: Gejolak Politik Dan Konstruksi Pembaharuan Keberagamaan*. Universitas Gadjah Mada, [Http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/](http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/)
- Al-Bantani, M. I. (2019). *Sejarah Perkembangan Organisasi Mathla'ul Anwar*. Pandeglang: Pustaka Mathla'ul Anwar.
- Asnawi, H. (2020). Peran Organisasi Islam dalam Pendidikan dan Kebangsaan: Studi atas Mathla'ul Anwar di Banten. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 145–162. <https://doi.org/10.24042/jpi.v12i2.6401>
- Aziz, M. (2017). *Peran Organisasi Keagamaan dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: LKiS.
- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). (2022). *Laporan Tahunan Baznas RI 2021*. Jakarta: Baznas RI.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) & Pengurus Besar Mathla'ul Anwar (PBMA). (2025). *Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Riset dan Inovasi, Pengabdian Masyarakat, LAZISMA, Dakwah, Pesantren, dan UMKM Bersertifikat Halal* (No. 057/MoU/BAZNAS/09/2025–B.0211/PBMA/MOU/2025). Jakarta: BAZNAS & PBMA.
- Grindle, M. S. (1997). *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries*. Boston, MA: Harvard Institute for International Development.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge, MA: MIT Press.
- LP3H Mathla'ul Anwar. (2016). *Sejarah dan Peran Mathla'ul Anwar dalam Pendidikan Islam di Indonesia*. Pandeglang: Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian Hukum Mathla'ul Anwar.
- Mathla'ul Anwar. (2020). *Profil dan Sejarah Organisasi*. Pandeglang: PPMA.
- Mathla'ul Anwar. (2023). *Sejarah Singkat Mathla'ul Anwar*. Situs Resmi Pengurus Besar Mathla'ul Anwar. Diakses dari <https://mathlaulanwar.or.id>
- Noor, M. (2016). Islam Moderat dan Kebangsaan: Peran Ormas Islam di Indonesia. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 16(1), 23–46. <https://doi.org/10.21154/tahrir.v16i1.322>
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- PB Mathla'ul Anwar Bidang Pendidikan. (2025). Jakarta, 20 Juni 2025.
- Pengurus Perguruan Mathla'ul Anwar Pusat. (2025). *Permohonan Bantuan Dana Rehab Dapur Santri Mathla'ul Anwar Boarding School (MABS) Cimanuk Pandeglang* (Surat Nomor: 611/SEK/PMA/V/2025, tanggal 22 Mei 2025). Menes: PBMA.
- Qardhawi, Y. (2005). *Fiqh az-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Saeiful Bahri, (2023). Peran Ulama Dalam Perkembangan Institusi Pendidikan Islam Mathlaul Anwar Dan Malnu. *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam
- Supriyadi, D. (2022). Ormas Islam dan Advokasi Pendidikan di Banten: Studi Kasus Mathla'ul Anwar. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 9(2), 201–219.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Wahid, A. (2019). *Islam dan Kebangsaan: Dinamika Organisasi Sosial di Indonesia*. Bandung: Mizan